

BAB IV

PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS HOLISTIK TERHADAP KEBIJAKAN POPULIS FRONT NASIONAL (FN)

Pradigma yang tepat dalam analisis studi kasus ini adalah menggunakan pendekatan Konstruktivisme Holistik yang merupakan salah satu varian atau cabang utama konstruktivisme. Penekanan pada struktur normative pada unit level dan sistemik bisa menjelaskan perilaku dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh partai Front Nasional sebagai aktor yang akan menciptakan sebuah kebijakan luar negeri Prancis. Berdasarkan konstruktivisme holistik, dimana pemikiran FN di ranah domestik yang akan menciptakan identitas korporasi dan identitas sosial. Artinya bahwa holistik dapat menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan populis dalam penekanan pada prioritas nasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Prancis. Kebijakan tersebut dijelaskan dalam proposal Marine Le Pen 2017, sehingga komitmen tersebut akan menjadi program Presiden. Walaupun program tersebut belum menjadi kebijakan luar negeri Prancis saat ini, akibat kekalahan yang didapatkan oleh Le Pen namun *collective identity* FN telah berhasil mendapatkan dukungan yang sangat signifikan. Fakta bahwa retorika populis yang tercantum pada proposal kebijakan kampanye Le Pen, telah berhasil mempengaruhi dinamika politik masyarakat Prancis. FN sebagai identitas Korporasi juga akan mempengaruhi perilaku negara dalam menentukan kebijakan luar negeri Prancis.

4.1 Teori Konstruktivisme

4.1.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang muncul sebagai pendekatan baru yang menjadi penengah terhadap teori sebelumnya. Para pakar konstruktivis HI meyakini bahwa adanya signifikansi struktur ideasional dalam sistem internasional. Struktur ideasional dan materil saling bergantung dalam pembentukan sebuah sistem. Konstruktivis melihat bahwa perubahan yang terjadi di dunia internasional bukan hanya didasari oleh fakta materil tetapi juga ada peran dari kekuatan Ide. Walaupun para pakar lebih menunjukkan bahwa kekuatan ide menjadi kekuatan dominan dari pada materi. Konstruktivis mengakui bahwa keduanya memiliki kedudukan ontologis yang setara. Realitas dalam dunia hubungan internasional yang bersifat materil tidak berarti apa-apa tanpa adanya peran dari ide (pemaknaan). Sebaliknya, ide tidak akan berfungsi menjadi sebuah pemaknaan jika tidak direpresentasikan dalam bentuk huruf atau bentuk simbol lainnya atau dalam bentuk fisik. Selain itu, konstruktivis juga mendoktrin tentang struktur internasional yang merupakan hasil dari distribusi kapabilitas ide, sehingga negara-negara lah yang bertindak sesuai dengan pola persebaran ide. Pola persebaran material lalu yang dimaknai sesuai dengan pola persebaran ide tersebut (Wendt A. , 1999, pp. 93-96) .

Konstruktivis juga melihat bahwa sejauh mana struktur dapat membentuk sebuah perilaku sosial dan aktor politik, baik individu maupun suatu negara, mengingat bahwa konstruktivis meyakini bahwa aspek normatif dan ideasional sama pentingnya. Konstruktivisme telah dibagi menjadi 3 varian yaitu konstruktivisme sistemik, konstruktivisme unit level dan konstruktivisme holistik. Pertama, Konstruktivisme sistemik yang berfokus pada struktur ideasional dan normatif dalam

lingkungan internasional, serta mengabaikan segala bentuk perubahan yang terjadi dalam ranah politik domestik. Fokus kajiannya adalah bagaimana munculnya norma, nilai dan identitas bersama dalam proses interaksi antar negara seperti kerja sama bilateral, regional, organisasi internasional lainnya. Kedua, Konstruktivisme unit level adalah kebaikan dari konstruktivisme sistemik, yang lebih berfokus pada ranah domestik, yaitu hubungan antara entitas sosial dengan nilai, norma-norma, hukum, identitas dan kepentingan suatu negara. Ketiga, Konstruktivisme holistik yang tidak memisahkan sektor domestik maupun internasional. Prespektif ini saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam pembentukan sebuah identitas dan kepentingan suatu negara (Reus-Smit, 2005, pp. 199-201).

4.1.2 Konstruktivisme holistik

Konstruktivisme Holistik adalah varian ketiga, dimana varian ini berbeda dengan varian yang sebelumnya. Jika analisis konstruktivisme sistemik lebih menekankan pada interaksi antar negara, sedangkan analisis konstruktivisme unit level yang menekankan pada pembentuk norma dan identitas di ranah domestic. Maka konstruktivisme holistik menjembatani kedua ranah tersebut, artinya bahwa prespektif ini melihat domain domestik dan internasional adalah sebuah kesatuan yang tidak dipisahkan. Varian ini melihat bahwa baik domestik dan ranah internasional saling berinteraksi satu sama lain dalam proses pembentukan identitas dan kepentingan negara (Reus-Smith, 1999, pp. 165-166).

Perspektif konstruktivisme holistik juga melihat bahwa varian sistemik dan level unit telah menciptakan dikotomi antara faktor domestik dan internasional,

artinya varian holistik menyatakan kedua varian tersebut memiliki peran yang sama dalam pembentukan perilaku negara. Asumsi Holistik mempercayai bahwa faktor domestik akan mempengaruhi identitas korporasi (corporate identity) sebuah negara, sementara faktor internasional akan mempengaruhi (social identity) negara. Penjelasan dari identitas korporasi dimaksudkan bahwa bagaimana sebuah negara akan memandang dirinya sendiri, sedangkan identitas sosial menjelaskan bagaimana sebuah negara akan memandang dirinya dalam sistem internasional. Holistik meyakini bahwa identitas korporasi sebuah negara akan mempengaruhi identitas sosialnya, begitupun akan sebaliknya. Sehingga kedua identitas ini akan berinteraksi untuk membentuk perilaku sebuah negara. Bisa dianalogikan bahwa kebijakan luar negeri sebuah negara, bisa dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai yang berkembang di tingkat domestik, sehingga nilai tersebut menjadi prinsip dalam pembentukan identitas korporasi negara. Oleh karenanya identitas tersebut akan menjadi konsepsi negara dalam memilih siapa yang akan dijadikan 'teman; dan 'musuh' negara tersebut. Dari perspektif konstruktivisme holistik, perlakuan kebijakan luar negeri dari suatu negara merupakan konsekuensi dari interaksi antar kedua identitas baik identitas korporasi (tingkat domestik) dan identitas sosial (tingkat internasional) (Reus-Smith, 2005, p. 201).

Perspektif holistik, melihat bahwa transformasi yang terjadi dalam identitas korporasi suatu negara tentu sebagai konsekuensi dari kondisi domestik, yang akhirnya akan mempengaruhi formasi di tingkat internasional dimana negara akan berusaha untuk mengatur ulang prioritas sesuai dengan identitas yang telah dibentuk.

Sehingga pendekatan ini menyoroti bagaimana pentingnya gagasan dan norma yang dianut baik domestik dan internasional dalam membentuk perilaku dalam membentuk sebuah kebijakan.

4.2 Partai Front Nasional (FN) sebagai Identitas dalam membentuk Wacana Populisme Proposal “Marine Le Pen 2017”

Konsep identitas di konseptualisasikan dan ditekankan dalam teori HI oleh para ilmuwan konstruktivis. Konstruktivisme telah bergerak dalam mengatasi masalah dengan membangun “cross-level models”, serta penekanan pada interaksi antar agen, perkembangan sosial dan struktur di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam menjelaskan hubungan antar negara menjadi penting dalam menganalisa bagaimana ide itu diciptakan dan berevolusi sehingga mempengaruhi persepsi negara dalam merespon situasi yang ada. Konstruktivisme juga menekankan pada kekuatan ide dan norma dalam menciptakan identitas serta dalam merumuskan kepentingan suatu negara sesuai dengan sosial masyarakat yang berkembang. Sehingga konstruktivis memegang kunci dengan prinsip bagaimana cara dunia material terbentuk dan dibentuk oleh aksi dan interaksi manusia tergantung pada interpretasi normative dalam berjalanya dunia material yang mengalami perubahan dinamis (Checkel, 2008, p. 78).

Setelah Marine Le Pen mengambil alih partai dari ayahnya dari 2011 lalu, dengan strategi ‘de-demonization’ telah membuat perkembangan secara signifikan. Marine Le Pen berhasil memperluas jaringan partai yang mampu merekrut lebih banyak anggota serta melipat gandakan suara elektoral partai. Menghilangkan label

ekstrem yang melekat selama ini, dengan lebih menggantikan retorika lebih dekat dengan rakyat Prancis. Marine Le Pen telah mengubah wajah FN dengan lebih populis, dengan menggunakan isu-isu dari kekhawatiran masyarakat Prancis secara aktif. Walaupun populis sendiri sudah melekat dari awal terbentuknya partai, namun tidak secara aktif diprioritaskan (KFCRIS, 2017, p. 11). Marine juga aktif dalam politik Eropa, bahkan dia menjadi salah satu sosok yang mendorong terbentuknya partai kelompok sayap kanan '*Europe of Nations and Freedom (ENF)*' di Parlemen Eropa bersama Geert Wilders. Pembentukan aliansi partai sayap kanan ini sebagai strategi untuk memberikan kehadiran yang lebih dalam tingkat Uni Eropa (Rettman, 2015).

Slogan yang menjadi dasar Marine Le Pen adalah "atas nama rakyat" sebagai pilar utama dalam pembuatan kebijakan (Sandford, 2017). Banyak para analisis melihat bahwa figur yang dilakukan oleh Marine Le Pen adalah untuk membangun kembali Perancis yang akan mengembalikan kehebatan Perancis, seperti halnya yang sering dikampanyekan oleh Presiden AS yaitu Trump yang telah berhasil menarik para pemilih (Vinocur, 2017). Kampanye yang dilakukan oleh Marine Le Pen sesuai dengan slogan "rakyat" yang artinya menjadi tujuan pertama dengan mengembalikan suara-suara kepada orang-orang (rakyat). Sebagai suatu strategi untuk menjamin langkah tersebut, Le Pen membuat kebijakan yang akan sering mengadakan referendum, diantaranya juga memungkinkan mengubahnya konstitusi Perancis juga terhadap referendum keanggotaan Perancis di UE. Hal tersebut direncanakan Le Pen untuk menarik rakyat dan memberikan penentuan arah yang harus ditempuh oleh

negara dengan keputusan yang diambil rakyat. Tentu setiap akan dilakukan referendum selalu akan mempengaruhi reputasi Presiden yang dipertahuhkan (Bénard, 2017).

Marine Le Pen menampilkan sebagai seorang pemimpin yang mewakili rakyat sebagai anti-elit, ia akan memperjuangkan pelayanan publik hanya untuk warga pribumi. Serta dirinya menampilkan gaya pemimpin yang melindungi kelas pekerja dan petani yang selama ini menjadi rakyat yang terpinggirkan dan tidak terwakili. Le Pen meyakinkan rakyat bahwa globalisasi saat ini sangatlah liar dan anarki sehingga perlu adanya penanganan secara menyeluruh untuk kembali keprioritas untuk warga asli Perancis (Nowak & Branford, 2017).

Dokumen proposal tersebut disampaikan pada konferensi besar di Lyon, dimana proyek tersebut berisikan 144 komitmen Le Pen terhadap janji jabatannya. Proposal yang dikeluarkan oleh Front National dalam ‘Marine 2017’ (Platiau, 2017).



Gambar 1: Front National (FN) “144 Engagements Presidentiels” (Pen, 2017)

Proposal kebijakan Marine Le Pen yang dipublikasikan, secara keseluruhan menekankan pada hak-hak populis yang artinya sebagian diprioritaskan untuk kepentingan warga Prancis dan kepentingan negara. Sesuai dengan apa yang dikampanyekan oleh Le Pen yang selama ini berada pada pinggiran politik untuk mewakili suara dari masyarakat yang merasa terancam akan keberadaan arus globalisasi. Dalam hal ini terdapat beberapa poin penting yang menjadi kebijakan Le Pen yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris di media milik Prancis, serta telah dirumuskan dalam beberapa sektor. Penulis akan menggunakan terjemahan ini untuk merepresentasikan dan menjabarkan poin-poin dalam artikel tersebut, yang dibuat dalam tabel-tebel (McNicoll & Davis, 2017).

4.2.1 Kebijakan Luar Negeri

Prinsip politik luar negeri yang digunakan oleh Front Nasional (FN), telah mempublikasi 144 manifesto program kampanye Marine Le Pen 2017. Program tersebut sebagai bentuk dari representasi dari nilai dan norma yang menjadi landasan utama dalam pembentukan identitas partai. Sehingga dalam konteks ini Marine Le Pen sebagai kandidat Presiden Prancis, telah merumuskan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan menjadi agenda program pemerintahannya jika berhasil memenangkan kursi Presiden (Melander, 2017).

Dari proposal yang dikeluarkan Marine Le Pen, yang sebagian besar lebih menekankan pada prioritas nasional. Penerapan hak-hak populis yang disajikan dalam program kampanyenya ternyata memberikan banyak dukungan dari masyarakat Prancis, terutama dalam mewakili suara para pekerja kelas menengah kebawah yang tidak mampu menghadapi tren globalisasi. Keberhasilan konstruk dari wacana partai, khususnya Marine Le Pen telah berhasil mempengaruhi dinamika politik masyarakat Prancis (KFCRIS, 2017, p. 12). Kebijakan Populisme pada faktanya telah berhasil meraup dukungan yang signifikan. Kebijakan populisme yang secara keseluruhan berada pada poin-poin penting kebijakan Marine Le Pen 2017, menjadikan negaranya lebih selektif dalam memilih keterlibatan Prancis dalam dunia internasional seperti halnya keterlibatan Prancis dalam Uni Eropa. Bahkan isu Frexit sempat membuat banyak perhatian media dan para akademisi, karena keputusan tersebut harus mendorong Prancis untuk mengubah konstitusi negara (McKirby, 2017).

Kandidat Presiden dari partai Front Nasional (FN), Marine Le Pen telah memberikan program-program mengenai kedaulatan nasional dan kebebasan Prancis.

Salah satu kebijakan yang cukup mendapat banyak perhatian adalah adanya kebijakan Le Pen untuk mengadakan referendum terhadap keanggotaan Prancis di Uni Eropa. Setelah adanya Brexit, kini isu Frexit telah menjadi isu utama dalam dinamika politik Uni Eropa (Evans-Pritchard, 2017). Manifesto terkait kebijakan Frexit terdapat dalam proposal asli yang dipublikasi langsung oleh partai Front Nasional (FN) dalam “*Engagements présidentiels Marine 2017*” yang menjadi poin utama dalam program Presiden.

“1) To give France its national sovereignty back. Towards a Europe of independent nations at the service of its peoples. To regain our freedom and mastery of our destiny by restoring sovereignty to the French people (monetary, legislative, territorial and economic). For this, a negotiation will be initiated with our European partners followed by a referendum on our membership of the European Union. The objective is to achieve a European project respecting the independence of France and of national sovereignties and serving the interests of the peoples.”

(European Movement International, 2017)

Pertama, Le Pen akan mengambil langkah untuk menegosiasikan reformasi dengan Uni Eropa selama 6 bulan. Hal tersebut bertujuan untuk mengubah aturan UE agar lebih memberikan kelonggaran bagi Prancis sebagai negara anggota dengan tidak ada lagi mata uang tunggal (euro), keluar dari wilayah bebas perbatasan (Schengen), aturan anggaran UE dan dalam keunggulan hukum UE. Jika perubahan tersebut tidak bisa didapatkan maka solusi yang diberikan oleh Le Pen adalah melaksanakan referendum keanggotaan Prancis “Frexit” dalam komunitas Uni Eropa (Melander, 2017). Walaupun banyak pengamat yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi dalam jangka pendek saat ini, dikarenakan Marine Le Pen harus mempunyai

koalisi mayoritas di Parlemen. Sedangkan dalam kampanyenya, Marine Le Pen berencana menggunakan pasal 11 konstitusi Prancis yang akan memberikan ruang yang lebih besar untuk mengajukan referendum tanpa melalui parlemen (Stothard, 2017).

Melalui ideologi Front Nasional (FN) sebagai partai sayap kanan, membentuk 3 pilar dalam menentukan kebijakan luar negeri Prancis yaitu kemerdekaan, identitas, dan ketertiban. Le Pen mengambil ide-ide Prancis tradisional terkait tempat dan peran negara di dunia dan mengembalikan ketundukan mereka terhadap Prancis. Pilar pertama “kemerdekaan” artinya bahwa walaupun Prancis berdiri diantara negara-negara besar di dunia, negara harus tetap mampu melindungi kepentingannya. Bukan hanya bergantung pada sejarah tetapi juga pada kekuatannya di panggung internasional. Sesuai dengan tujuan tersebut Le Pen akan menguatkan militer Prancis, ia ingin memberikan 3% dari produk domestik bruto (PDB), termasuk juga dengan dana untuk memodernisasi penangkalan nuklir Prancis (Lafont Rapnoil & Shapiro, 2017).

Selama ini Prancis telah terbuka dengan organisasi internasional besar seperti NATO, UE, dan juga PBB. Namun kebijakan Le Pen secara tegas menolak dua lembaga tersebut yaitu NATO dan UE, dimana organisasi tersebut dianggap menghambat Prancis untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Saat ini Le Pen akan menerima kerja sama internasional yang hanya atas dasar kesetaraan kedaulatan yang ketat dan secara langsung melayani kepentingan Prancis. Dengan demikian Prancis tidak perlu lagi menerima kewajiban hukum yang membatasi kemerdekaan

Prancis, sehingga tidak perlu berpartisipasi dalam perang di negara lain atau ikut serta dalam aliansi tersebut (Melander, 2017).

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam Kebijakan Luar Negeri, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017 :

Table 1: Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam kebijakan luar negeri

<p>“Command respect for France.”</p> <p>Europe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renegotiate all European treaties within six months. After that period, it will be up to the French people to validate or reject the result of the negotiations by referendum • Withdraw from the euro and the Schengen Agreement • Denounce all free trade accords, such as CETA between the EU and Canada • Eliminate the European directive on workers from one country posted to jobs in another (280,000 of whom are posted in France, or the equivalent of 40,000 full-time positions, out of a total of 18 million employees) 	<p>World</p> <ul style="list-style-type: none"> • In favour of a rapprochement with Moscow • Increase French aid to Africa to 0.7 percent of GNP. Prioritise countries in the Sahel region • Withdraw from NATO’s integrated command • Oppose intervention in Syria¹
---	--

Sumber : Berita Media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

4.2.2 Reformasi Lembaga

A. Prioritas Nasional

Dalam lembar halaman program Marine Le Pen, terdapat kebijakan reformasi konstitusional yang akan diusulkan kepada rakyat Perancis. Setelah dirinya berhasil

¹ Beberapa poin-poin yang terdapat pada proposal ‘144 komitmen Marine Le Pen’ yang dipublikasi langsung oleh partai Front Nasional (FN). Artikel proposal tersebut di terjemahkan dari bahasa Prancis-Inggris melalui ‘France 24’ yang merupakan website media Prancis. Bagian poin-poin dalam sektor kebijakan luar negeri

memenangkan kursi Presiden, Le Pen akan menyerukan referendum untuk mengadopsi serangkaian amandemen konstitusi yang dianggap akan mengembalikan kebesaran konstitusi 1958. Dengan program konstitusi ini bertujuan untuk secara mendalam mereformasi organisasi negara Perancis dan lembaga-lembaganya.

Salah satunya juga untuk memasukan konsep “prioritas nasional” yang akan memberikan prioritas terhadap warga Perancis dalam beberapa sector seperti dalam pekerjaan, perumahan, dan kesejahteraan sosial. Walaupun reformasi semacam itu tentu akan bertentangan dengan identitas konstitusional Perancis yang sebagaimana dalam pasal 1 dari konstitusi yang menyatakan bahwa “persamaan semua warga negara dihadapan hukum tanpa membedakan asal, ras dan agama dan penghormatan semua keyakinan” (Fournier, 2018, p. 6).

B. Referendum Amandemen Konstitusi

Marine Le Pen bersumpah untuk mengadakan referendum tentang amandemen konstitusi, dengan memasukan ketentuan bahwa semua perubahan konstitusi di masa depan hanya dilakukan melalui referendum. Referendum tersebut dapat diatur dan dilakukan jika mendapat dukungan setidaknya 500.000 warga (Klimentyl, 2017). Dimana juga sesuai dengan janji utama, Marine Le Pen akan melakukan referendum terhadap keanggotaan Perancis di UE, artinya juga akan meninggalkan Pengadilan Hak Asasi manusia Eropa dan lembaga serupa lainnya yang bertentangan dengan konstitusi tersebut (Hakimi, 2018). Marine Le Pen juga akan menggunakan referendum untuk "mengembalikan keunggulan hukum nasional" dengan penghapusan Judul Bab 15 Konstitusi, yang menyelenggarakan hubungan

antar Negara Perancis dan lembaga-lembaga Uni Eropa. Pasal 55 juga akan dihapuskan dalam rangka membangun kembali otoritas hukum nasional pada perjanjian internasional serta keunggulan lembaga peradilan nasional selama pengadilan supra-negara (Fournier, 2018, p. 7).

C. Perpanjang masa jabatan dan pemotongan anggota parlemen

Marine Le Pen juga akan mengunsulkan konstitusi mengenai masa jabatan kepresidenan, yang mana ia menginginkan perpanjangan masa jabatan untuk Presiden yang semula 5 tahun menjadi 7 tahun. Poin selanjutnya dia akan mengusulkan konstitusi untuk pengurangan setengah dari jumlah total anggota parlemen (dari 500 menjadi 300 untuk *National Assembly*, dan untuk *senat* dari 348 menjadi 200 orang) (Fournier, 2018, p. 8). Marine Le Pen juga akan mengurangi tingkat administrasi dari 6 menjadi 3, yaitu tingkat komune, departemen dan negara (Klimenty, 2017).

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam bidang reformasi institusional, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017:

Table 2 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam sektor reformasi konstitusi

<p>“Let the people speak and establish a democracy that is close to the people.”</p> <ul style="list-style-type: none">• Hold a referendum on widespread institutional reform that introduces proportional representation• Allow referenda based on public initiative once at least 500,000 voters have signed on to a request• Inscribe “the defence of our people’s identity and our cultural and historical heritage” as national priorities in the constitution• Reduce the number of parliamentarians• Increase the length of a presidential term from five to seven years and make it non-renewable• Limit elected officials’ ability to hold multiple offices at the same time²
--

Sumber : Berita media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

4.2.3 Kebijakan Ekonomi

A. Proteksi Ekonomi

Dalam kebijakan ekonomi yang dikeluarkan dalam manifesto Le Pen, dia akan menerapkan kebijakan proteksionisme ekonomi. Dimana Marine Le Pen akan lebih menekankan pada keuntungan dan kepentingan negara Perancis. Proteksi tersebut akan ada tarif baru, pemberian pajak pada pekerja asing, adanya tawaran untuk meninggalkan mata uang tunggal (euro) dan mengembalikan mata uang nasional (franc). Dia akan mendukung para pengusaha kecil dari pada perusahaan global, bahkan ia akan mendiskusikan terkait nasionalisasi bank-bank Perancis serta memastikan tidak akan adanya kendala dari negara lain maupun Uni Eropa (UE). (Llorente, 2017).

² Beberapa poin-poin yang terdapat pada proposal ‘144 komitmen Marine Le Pen’ yang dipublikasi langsung oleh partai Front Nasional (FN). Artikel proposal tersebut di terjemahkan dari bahasa Prancis-Inggris melalui ‘france 24’ yang merupakan website Prancis. Bagian poin-poin dalam sektor Kelembagaan

Marine Le Pen dalam kampanyenya selalu menyalahkan kebijakan ekonomi oleh pemerintah selama ini yang jauh dari kepentingan warga negara Perancis. Dimana hal tersebut dikarenakan arus globalisasi, organisasi internasional seperti Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia yang membuat krisis saat ini. Sehingga solusi yang diberikan oleh Le pen adalah menutup pasar Perancis dari persaingan global dan mengembalikan mata uang nasional. Dimana dibawah kepemimpinannya, ia ingin menekankan statisme tradisional Perancis yang akan memperkuat peran pemerintah untuk mengintervensi dalam aspek-aspek tertentu dalam perekonomian (Stockemer & Barisione, 2016, p. 6). Marine Le Pen menginginkan sebuah negara yang melindungi pasar internal Prancis dari kompetisi asing. Le Pen juga ingin mengatur industri keuangan dan menanamkan itu dengan nilai moral. Bahkan Le Pen tidak akan memiliki keraguan tentang nasionalisasi lembaga keuangan yang bermasalah, mengembalikan mereka ke pasar nanti (Clercq, 2011, p. 4).

B. Kembali ke Mata Uang Nasional “Franc”

Arus globalisasi yang tidak terbendung, membuat sebagian masyarakat Perancis merasa kesulitan dengan adanya mobilisasi manusia yang semakin bebas. Adanya aturan yang melekat pada Integrasi Uni Eropa dianggap telah menjadi kendala sebagian orang dengan penghasilan rendah yang tidak terwakilkan suaranya. Front Nasional (FN) merupakan salah satu partai yang menjadi pelindung bagi orang-orang kecil, bahkan mempunyai program kebijakan bagi para pekerja kelas menengah kebawah. Mereka sudah tidak lagi percaya terhadap program pemerintah dengan

ekonomi terbuka yang lebih berpihak pada Uni Eropa (Clercq, 2011). Mereka tidak lagi bisa menopang mata uang tunggal, serta harus bekerja melalui persaingan global yang hanya menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Sedangkan Marine Le Pen telah menawarkan solusi, yang berjanji untuk membawa Prancis keluar dari euro, menerapkan proteksionis dan mengaskan kembali negara supremasi atas kekuatan pasar. Front Nasional menolak semua ide yang menjadi aturan dalam Uni Eropa, globalisasi, perdagangan bebas dan dominasi pelayanan dan industri keuangan (McAuley, 2017).

Sesuai dengan yang dikampanyekan, Marine Le Pen melihat euro yang hampir pecah selama krisis utang pada 2010-2012. Marine Le Pen mengatakan bahwa saat ini euro yang selama ini menjadi mata uang tunggal Eropa telah gagal total. Mata uang yang mulai diperkenalkan pada 2002 silam, telah memicu kenaikan harga secara umum dan secara substansial mengikis daya beli rumah tangga. Marine Le Pen menginginkan Prancis kembali menggunakan mata uang nasional yaitu 'franc' tanpa lagi menggunakan euro. Le Pen mengatakan bahwa sesuai dengan data IMF, euro Prancis mengalami "overvalued" berada pada sekitar 15% artinya mata uang tunggal dianggap telah membunuh Prancis. Le Pen juga menambahkan bahwa Prancis akan terbuka dengan negosiasi untuk memulai kerjasama ekonomi yang baru dengan negara Eropa lainnya hanya dalam fokus untuk perusahaan dan pemerintah. Kemudian Marine Le Pen menyarankan Eropa untuk kembali ke mata uang nasional yang diakui, yang akan dihubungkan melalui sistem mata uang umum seperti

European Currency Unit (ECU) dalam upaya melunakan dampak ekonomi (Mcguinnes, 2017).

Kebijakan Janji untuk mengenalkan kembali mata uang Prancis yaitu Franc cukup menjadi perhatian kalangan politisi, mengingat bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan mata uang bersama euro pada tahun 2002. Keputusan keluarnya Prancis di Uni Eropa, tentu akan berdampak bagi negara Prancis serta masa depan UE. Banyak pengamat yang meramalkan kondisi Prancis jika keluar dari UE dan meninggalkan euro akan berdampak buruk bagi ekonomi Prancis yang juga akan memicu jatuhnya Uni Eropa. mengingat bahwa Prancis merupakan negara yang menyimpan bank terbesar kedua di Eropa, serta perusahaan besar lainnya yang tentu hal tersebut akan memicu krisis ekonomi global. Namun Marine Le Pen mengatakan bahwa meninggalkan Uni Eropa adalah keputusan yang terbaik, yang akan membantu negara menjadi 'grande nation' atau negara besar. Baginya kerjasama bilateralisme adalah keputusan di masa depan, dan multilateralisme adalah kebijakan di masa lalu. Dia mengingatkan akan bahaya yang ditimbulkan adanya globalisasi saat ini yang telah membuat jalan bagi imigran yang mencuri hak-hak warga pribumi, serta adanya teror Islam radikal yang mengancam. Sehingga solusi yang terbaik adalah mendapatkan kembali kedaulatan, serta mengakhiri perjanjian perdagangan bebas dan kembali ke sistem proteksionis (Louis L. , 2017).

Proposal Marine Le Pen tahun 2017, memberikan kontribusi di sektor ekonomi dengan 'prioritas nasional' serta menerapkan proteksi cerdas untuk

mendukung para pekerja dan ekonomi nasional. Berikut poin-poin dalam artikel sesuai dengan proposal Marine Le Pen :

Table 3 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Ekonomi

<p>Employment</p> <ul style="list-style-type: none"> • Repeal the Labour Law known as the El Khomri Law • Maintain the 35-hour workweek • Tax the hiring of foreign employees in order to favour French nationals • Hire 21,000 public servants for the police, customs service and in hospitals • Preserve the status of public servants and increase their salaries • Introduce a “First job” plan that would completely exempt a first job for a young person under 21 from social contributions <p>Businesses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transform the Tax Credit for Competitiveness and Employment (CICE) into a reduction of social and employer contributions • Reduce corporate taxes • Introduce a 35 percent tax on products manufactured by companies that have outsourced their production • Return to a national (not EU) agricultural policy • Exempt overtime hours from taxation 	<p>Purchasing power</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establish a purchasing-power bonus for people earning less than €1,500 per month • Nationalise highways • Reduce the price of gas, electricity and train journeys by 5 percent • Reduce taxes on oil in order to push down the price of gas at the pumps <p>Taxation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Introduce a 10 percent reduction on the three first income-tax tranches • Freeze residency tax • Exempt family gifts from taxes: Donations from parents to their children under €100,000 euros per child every five years and €50,000 euros for grandchildren would not be taxed ³
--	---

Sumber : Berita Media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

³ France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor Ekonomi”

4.2.4 Kebijakan Keamanan

A. Imigrasi

Setelah berjanji untuk keluar dari zona euro, Le Pen juga berjanji untuk mengambil kembali perbatasan Prancis untuk keluar dari zona Schengen. Hal tersebut sebagai langkah awal dalam kebijakan keamanan yang diagendakan Marine Le Pen setelah memerintah. Bagi Le Pen Islam dan imigrasi adalah ketakutan yang menjadi inti dari platform nativisme Le Pen. Baik keduanya sangat bertentangan dengan budaya dan identitas Prancis yang sekuler. Platform Marine Le Pen menyalurkan kegelisahan yang meluas di Prancis yang dipicu atas serangan yang terjadi di Prancis selama ini. Serangan teroris yang menyerang Paris pada November 2015, ditambah dalam kasus Nice pada Juli 2016. Krisis pengungsi yang berkelanjutan membuat gelombang imigran tidak berdokumen telah menjadi ancaman di seluruh Eropa (Wildman, 2017). Zona Schengen sendiri merupakan salah satu kerjasama Uni Eropa yang menerapkan UU terkait perjalanan bebas paspor di 27 negara Eropa. Sehingga perjanjian tersebut telah tumbuh menjadi kebijakan yang mengancam keamanan negara-negara Eropa, terkhusus bagi Prancis yang telah mengalami serentetan serangan teror (Bayliss, 2017).

Le Pen mencantumkan 3 alasan utama mengapa imigrasi harus dihentikan. Pertama, imigrasi digunakan sebagai bisnis besar untuk memberi tekanan pada upah dan hak sosial pekerja Prancis. Imigrasi dirasakan bukan program humanis yang selalu diklaim oleh MEDEF, Komisi Eropa, dan perusahaan CAC tetapi sebagai proyek senjata pelayanan modal besar. Kedua, imigrasi merupakan biaya yang

signifikan bagi masyarakat nasional yang diperkirakan mencapai 70 miliar euro per tahun oleh ekonom Yves-Maarie Laulan (Waters, 2016). Ketiga, imigrasi yang tidak terkendali merupakan sumber ketegangan bagi masyarakat karena sudah tidak mampu mengasimilasi pendatang baru di Prancis. Marine Le Pen berpendapat bahwa banyak imigran yang telah merusak identitas Prancis, seperti adanya imigran muslim yang semakin banyak yang datang.

Dalam program kampanye 2017, Marine Le Pen telah mengusulkan serangkaian tindakan anti-imigrasi, yang di kampanyekan berbulan-bulan dalam program khususnya dalam memulihkan perbatasan Prancis. Le Pen menjanjikan dalam sebuah proposal programnya, menjanjikan untuk “moratorium” imigrasi, pengusiran imigran ilegal serta memotong bantuan medis untuk imigran ilegal. Setidaknya banyak masyarakat Prancis yang resah terhadap keberadaan imigran yang dianggap telah mencuri hak mereka. Terutama terhadap imigran muslim yang jelas sangat berbeda dengan budaya mereka, bahkan tidak mampu menyesuaikan dengan cara hidup orang Prancis. Prancis memiliki catatan jumlah pencari suaka tahun lalu sekitar 85.700 dan sekitar 227.500 orang asing diberi izin tinggal yang mana meningkat 5% dari tahun sebelumnya. Program yang ditawarkan Marine Le Pen adalah untuk membatasi secara drastis imigran legal menjadi 10.000 orang per tahun (Nositter, 2017).

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam bidang Imigrasi, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017:

Table 4 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Imigrasi

<p>Imigran</p> <p>“Get back to borders that protect us and end out-of-control immigration.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Re-establish border inspections and withdraw from the Schengen Agreement • Limit the number of legal admissions onto French territory to 10,000 per year. The average number of legal admissions per year between 2004 and 2012 is estimated at 200,000 • Limit conditions for asylum: instead of requiring that an asylum-seeker be present on French soil in order to apply, applications should be filed at French embassies and consulates in an asylum-seeker’s country of origin or its neighbouring countries • Toughen family reunification rules • Limit the arrival of foreign workers to sectors where finding new hires has proven difficult 	<p>Nationality</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eliminate the principle of jus soli (the right of the soil): French nationality will be obtained through ancestry or by naturalisation at the age of majority • Ban French dual nationality for non-Europeans • Ban the naturalisation of undocumented foreigners • Establish a national preference: eliminate State Medical Aid (AME), which benefits numerous foreigners; make French citizens a priority for social housing; minimum welfare payments should go solely to French nationals⁴
--	--

Sumber : Website pemerintah Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

B. Terorisme dan Pertahanan

Kebijakan Marine Le Pen yang akan mengikis imigrasi hingga 10.000 pertahun, bukan hanya berkaitan dengan melindungi para pekerja asli Prancis tetapi juga untuk menjaga keamanan Prancis dari orang asing. Sejak tahun 2015, Prancis telah mengalami serangkaian terorisme secara beruntun. Dua tahun terakhir setidaknya

⁴ France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor imigrasi”

Prancis telah menyaksikan hampir 240 orang tewas akibat serangan tersebut. Serangan terror islam jihadis terutama berkaitan dengan ISIS telah menambah islamophobia yang berkembang di Prancis. Sehingga dalam agenda utama masa kepemimpinannya, Marine Le Pen akan membawa Prancis keluar dari perbatasan Schengen dan juga mengembalikan prosedur untuk pengecekan paspor untuk negara Eropa lainnya (Dearden, 2017).

Kebijakan keamanan Le Pen juga memperkuat kontrol internal dan eksternal. Kebijakan Marine Le Pen dalam membuat agenda program untuk memproteksi keamanan Prancis, Le Pen akan menambah 50.000 pos militer dan akan merekrut 15.000 petugas polisi. Serta akan ada hukuman yang lebih keras dan membuat tambahan 40.000 tempat penjara, menghilangkan hukuman mati diganti dengan hukuman seumur hidup. Tentu hal tersebut perlu adanya dukungan untuk Prancis agar dapat mengendalikan secara penuh perbatasannya, dengan keluar dari perjanjian Schengen. Le Pen juga bertujuan untuk merekrut tambahan 6.000 polisi perbatasan. kebijakan dengan melawan para terorisme juga di mulai dengan adanya pembentukan badan anti-terorisme baru (Liz Alderman, 2017). Dalam kebijakan pertahanannya, kandidat Presiden sayap kanan Marine Le Pen berjanji untuk meningkatkan anggaran pembelanjaan pertahanan Prancis. Marine Le Pen berjanji di tahun 2018, anggaran pertahanan di Prancis akan berjumlah 2 persen dari PDB. Setelahnya Le Pen akan meningkatkan pembelanjaan pertahanan Prancis menjadi 3% dari PDB pada tahun 2022 (Saget, 2017) .

Berikut poin-poin yang terdapat dalam proposal “Marine Le Pen 2017” dalam bidang terorisme dan pertahanan, yang telah di publikasi pada kampanye Presiden 2017 :

Table 5 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Terorisme dan Pertahanan

Domestic	Defence
<p>“Eradicating terrorism and breaking the Islamic fundamentalist network.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reinforce spending on domestic and foreign intelligence • Ban and dissolve all Islamist fundamentalist organisations • Reinstate WWII-era penal codes to strip convicted terrorists of their civic rights • Create an anti-terrorism agency that would report directly to the prime minister • Deport all non-citizens on the official Fiche S terror watch list; strip nationality from dual citizens convicted of terrorism offences • Repeal the “Dati” and “Taubira” prison reform laws which reduce some sentences, in order to end “judicial laxity” • Build an additional 40,000 places in prison • “Disarm” France’s poor suburbs by targeting 5,000 gang leaders identified by the Interior Ministry • Establish mandatory life imprisonment for the most serious cases 	<ul style="list-style-type: none"> • Fix the defence budget at 2 percent of GDP immediately, and increase it to 3 percent (or €60 billion) by 2022 (compared to €40 billion in 2017) • Re-establish a compulsory military service of at least three months • Build a second aircraft carrier at a cost of €4.5 billion • Increase the number of police and gendarmes by 15,000 • Consolidate the army and add 24,000 new recruits⁵

Sumber : Berita media Prancis ‘France 2’ (McNicol & Davis, 2017)

⁵ France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor Keamanan”

4.2.5 Kebijakan Sosial

A. Ketenagakerjaan

Program Marine Le Pen memiliki karakter anti-elitis yang cukup kuat. Marine Le Pen membuat dirinya menjadi perwakilan dari orang-orang jujur dan bekerja keras yang tidak hanya menghadapi persaingan asing yang tidak adil, tetapi juga diatur oleh elit politik dan sosial yang korup. Le Pen juga tidak hanya berjanji untuk menghentikan pengeluaran mewah atas penggantian biaya yang berlebihan dari para elit partai, tapi dia juga mengidentifikasi gaya hidup mewah elit politik Perancis sebagai penyebab utama krisis utang Perancis. Dia ingin menyingkirkan korupsi, dominasi elit dan ketergantungan Perancis di organisasi internasional (Chrisafis, 2017).

Peningkatan angka pengangguran menjadi salah satu isu utama bagi para pemilih partai Front Nasional (FN). Tingkat pengangguran Prancis berjalan sekitar 10%, yang mana angka tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari Jerman dan Inggris bahkan lebih tinggi dari rata-rata zona euro. Angka tersebut juga belum turun dibawah 9% sejak krisis ekonomi global tahun 2008. Marine Le Pen memberikan solusi untuk industrialisasi yang di pimpin negara dan memberikan pajak yang lebih besar terhadap pekerja asing hal tersebut dimaksudkan bisa memberikan lapangan kerja bagi para warga Perancis yang belum mendapat pekerjaan. Bisa dilihat bahwa isu pengangguran menjadi dasar ketakutan masyarakat. Faktor tersebut juga menjadi dorongan dari Partai Kebebasan Inggris (UKIP) yang meyakinkan solusi untuk perbatasan yang lebih kuat, mencegah imigran ekonomi yang mencuri peluang warga

asli Inggris sehingga dapat mengurangi angka pengangguran (Safdar & El Amraoui, 2017).

Dalam hal pasar ketenagakerjaan Prancis, Le Pen telah mengkampanyekan secara efektif untuk melestarikan perlindungan yang ada bagi para pekerja dengan preferensi untuk alokasi pekerjaan kepada warga negara Prancis. Adanya akses layanan di berbagai sector dengan memprioritaskan kepada warga Perancis seperti sector kesehatan, pendidikan, perumahan dan sector lainnya. Le Pen akan menjamin perlindungan sosial pada pekerja seperti adanya perbaikan usia pensiun pada usia 60 tahun yang semula 62 tahun (Bowden, 2017).

Table 6 : Proposal Kebijakan Marine Le Pen dalam Sektor Sosial

Secularism	Family	Retirement
<ul style="list-style-type: none"> • Toughen the 2004 law against wearing religious symbols in public places • Impose “secularity, but also neutrality and security” by re-introducing school uniforms, and by banning the Muslim headscarf at university • Expand secularism to cover all public spaces, making it part of the Labour Law 	<ul style="list-style-type: none"> • Re-establish universal social welfare for all French families • Ban in vitro fertilisation for single women and lesbian couples • Increase benefits for disabled people 	<ul style="list-style-type: none"> • Lower the retirement age to 60 • Increase the minimum pension and limit it to those with French nationality or a minimum of 20 years residency in France⁶

Sumber : Berita Media Prancis ‘France 2’ (McNicoll & Davis, 2017)

⁶ France 24, terjemahan artikel proposal Marine Le Pen 2017 “sektor Sosial”

4.3 Analisis Holistik Dalam Pembentukan Wacana Kebijakan Proposal Marine Le Pen 2017

Front Nasional (FN) sejak didirikan telah menjadi politik identitas utama sayap kanan ekstrem di Eropa. Sejarah pendiriannya sebagai partai yang mewakili suara semua gerakan yang menentang pemerintah, hingga menyatukan identitas bersama dalam satu payung yaitu partai FN. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana perkembangan partai FN dalam pencapaian dukungan masyarakat Prancis. Sejak awal FN telah mengadopsi nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip liberalisme dan demokrasi seperti fasis, xenophobia, rasisme dan antisemitisme. Sehingga FN sudah berada dipinggiran politik Prancis bersamaan dengan semangat penyatuan identitas Uni Eropa pasca perang. Bahkan latar belakang penyatuan gerakan dalam partai FN juga didasari atas penggalangan dukungan untuk menyambut pemilihan legislatif di Prancis pada saat itu (Anttila, 2017, pp. 11-12). Front Nasional (FN) telah mengalami dinamika politik yang sangat panjang, sebagai politik sayap kanan tertua di Eropa. Sejak berdirinya FN menekankan pada nilai-nilai nasionalisme Prancis, sehingga FN menolak atas keberadaan kelembagaan Uni Eropa yang membuat FN selalu mengkampanyekan wacana ekstrem (Willsher, 2018).

Latar belakang sejarah pembentukan FN, dari penyatuan *collective identity* yang dibangun menjadi landasan utama gerakan partai tersebut dalam menentukan wacana-wacana strategi. Walaupun secara perkembangannya terdapat transformasi partai dengan kepemimpinan baru, dimana pengalihan partai yang dipegang oleh Marine Le Pen dimulai sejak 2011. Marine Le Pen mengubah nilai dan norma

‘ekstrem’ yang selama ini melekat dalam partai dengan wacana yang lebih lunak. Strategi yang dibuat Le Pen dengan strategi ‘de-demonization’ yang artinya mengubah FN menjadi partai yang menggunakan retorika wacana lebih dekat dengan orang-orang (populis). Walaupun transformasi tersebut dikatakan mengubah wajah partai dengan menghilangkan nilai ekstrem, namun secara tidak langsung partai tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai yang menjadi dasar utama partai seperti nasionalisme dan anti-imigrasi yang tetap menimbulkan penentangan terhadap nilai kelembagaan yang ada (Nielsen, 2017, pp. 31-32).

Gagasan politik identitas yang dibangun oleh FN, sebagai prinsip menjadikan sumber utama atau dasar pembentukan wacana dalam mendefinisikan kepentingan dan identitas negara. FN yang merupakan salah satu partai yang mewakili partai sayap kanan jauh Prancis, membentuk program dan wacana sesuai dengan identitas korporasi. Sehingga identitas korporasi yang dibangun akan mempengaruhi perilaku negara dalam menentukan kebijakan atau keputusan negara dalam arah politiknya baik dibangun dalam ranah domestik ataupun internasional.

Pada tahun 2017, Marine Le Pen maju dalam pemilihan Presiden yang mana berhasil lolos dalam putaran kedua dan menjadi oposisi utama. Keberhasilan tersebut menjadi momentum kedua, setelah ayahnya Jean Marie Le Pen sukses maju ke putaran kedua yaitu pada tahun 2002. Hingga kepemimpinan Marine Le Pen, dimulai tahun 2011 yang secara signifikan terus mengalami peningkatan baik dalam anggota partai, basis dukungan hingga peningkatan jumlah perwakilan yang berhasil menjabat. Hingga pada pemilihan terakhir 2017, FN berhasil meraup

dukungan masyarakat 33% atau hampir 11 juta suara yang menjadi suara terbanyak sepanjang sejarah elektoral FN (Adu, 2017).

Pada pemilihan Presiden putaran pertama, Le Pen berhasil menyingkirkan dua partai *mainstream* yang selama ini mendominasi parlemen dengan meraup basis dukungan masyarakat. Kemenangan suara babak pertama partai Emmanuel Macron dan Marine Le pen menjadi sejarah dinamika pemilihan Presiden Prancis, mengingat kedua partai tersebut notabene bukan partai besar (Mcintosh, 2017). Walaupun dalam hasil putaran terakhir Le Pen tidak bisa memenangkan kursi Presiden, namun hasil dukungan terakhir menjadi kemenangan bagi dinamika politik partai sayap kanan Prancis. Hasil dari peningkatan suara tersebut menjadikan fakta bahwa FN telah berhasil mempengaruhi politik masyarakat Prancis. Wacana yang dibangun oleh FN yang berasal dari kekhawatiran dari masyarakat Prancis pada nyatanya berhasil meningkatkan pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Front Nasional (FN) sebagai aktor dari domestik yang membentuk identitas korporasi dengan membawa ideologi partai dalam bentuk wacana yang ada. Sehingga wacana tersebut menginterpretasikan identitas dan kepentingan yang dibangun untuk membentuk perilaku negara. Sedangkan dalam wacana tersebut juga didukung melalui interaksi sistemik, artinya bahwa terdapat faktor struktur dari sistem internasional yang mempengaruhi pembentukan perilaku negara. Sesuai dengan pandangan holistik, baik faktor domestik dan internasional keduanya saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk sebuah kebijakan negara (Reus-Smith, 1999, p. 167). Pembentukan lembaga Uni Eropa ternyata telah memberikan

banyak batasan terhadap negara untuk mengatur tindakanya sendiri, UE dianggap telah memberikan banyak ancaman-ancaman bagi masyarakat Prancis. Adanya krisis yang disebabkan struktur tersebut telah membuat peningkatan dukungan FN di Prancis, lambatnnya pemerintah yang selama ini berkuasa membuat masyarakat kian skeptis dengan lembaga tersebut (Wisniewska & Ehrenberg-Shannon, 2017). Sehingga wacana yang dibentuk oleh FN melalui proposal ‘144 engagement Marine Le Pen 2017’ dibentuk karena ada pengaruh dari interaksi level unit dan level internasional.

gambar 2 : Penerapan Logika Konstruktivisme Holistic



Dari prespektif Holistik, bisa dipahami bahwa baik faktor domestik dan faktor internasional akan membentuk identitas korporasi dan identitas sosial negara yang saling berinteraksi satu sama lain. Sehingga interaksi tersebut akan membentuk sebuah definisi baru bagaimana negara memandang dirinya dan memandang orang lain. Dapat dianalogikan jika Marine Le Pen berhasil menang dan menjadikan FN partai yang berkuasa, maka FN sebagai aktor domestik dengan membawa nilai-nilai yang membentuk identitas korporasi. Serta identitas FN membentuk identitas sosial yang mana sebagai penentu dalam membentuk suatu kebijakan negara. Wacana yang

dibentuk FN sebagai suatu identitas akan menentukan prioritas kepentingan dari Prancis. Sehingga pembentukan kebijakan proposal Marine Le Pen yang dipublikasi oleh FN, menjadi konsekuensi terhadap interaksi domestic dan interaksi internasional (Auth, 2005, pp. 50-51).

Faktor ranah domestik, juga didasari pada ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang selama ini berkuasa. Selama 50 tahun, Partai Sosialis dan partai Les republican selalu menjadi partai dominan di Parlemen Prancis. Keduanya selalu menjadi partai dengan perolehan dukungan yang besar dari masyarakat. Pada pemilihan Presiden 2017 yang lalu, kedua partai tersebut secara mengejutkan tersingkir pada hasil pemilihan pada putaran pertama. Kedua partai tersebut dikalahkan oleh partai Enn Marche dan FN, yang berhasil mendapat dukungan terbesar dari kalangan masyarakat. Partai arus utama yang selama ini berkuasa dianggap tidak memberikan perubahan apapun terhadap masalah yang terjadi pada masyarakat kelas menengah kebawah atau kalangan para pekerja. Sehingga para akademisi melihat bahwa masyarakat Prancis kecewa dengan kedua partai mainstream tersebut, sehingga masyarakat Prancis menginginkan wajah baru untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat yang lebih nyata (Alessandri, Auers, & Balcere, 2017, pp. 127-128). Baik partai sosialis ataupun partai UMP, keduanya tidak bisa secara tegas menentukan kepentingan nasional yang selalu bergantung pada aturan dan hukum Uni Eropa tanpa melihat masyarakat asli Prancis. Sehingga krisis internal yang terjadi seperti efek jatuhnya euro, krisis pengungsi dan imigrasi, terorisme, dan pengangguran menjadi pengaruh dalam pembentukan wacana FN

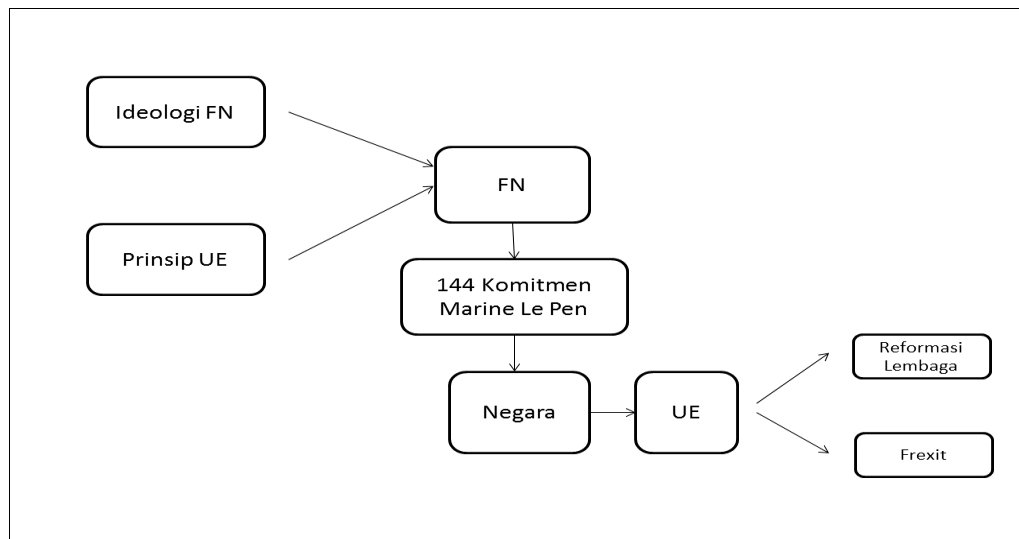
dalam menentukan kebijakan kampanye pemilihan Presiden Marine Le Pen. Akibat dampak dari banyaknya konflik internal tersebut juga mendorong peningkatan dukungan FN (Perrineau, 2017) .

Dalam interaksi sistemik, Idealitas yang dibangun dalam lembaga Uni Eropa (UE), faktanya dianggap tidak lagi sesuai dengan realitasnya. Banyaknya masalah yang terjadi di Prancis yang disebabkan lembaga tersebut mendorong skeptisme, sehingga proposal kebijakan FN tersebut dapat menjelaskan perilaku FN yang akan menentukan negara dalam membentuk kebijakan domestik dan internasional. Struktur Uni Eropa yang menerapkan nilai dan norma yang berlaku secara dominan, terkadang memaksakan negara untuk terlibat langsung dalam aturan tersebut. Prinsip UE dengan penerapan ekonomi pasar tunggal harus membuka modal, barang, jasa dan mobilisasi orang-orang untuk dapat bergerak bebas tanpa hambatan. Sedangkan dalam prinsip HAM, membuat anggota Uni Eropa harus membuka negara dalam menerima pengungsi dan pencari suaka dari negara lain seperti dari Timur Tengah. Bahkan banyaknya imigran muslim di Eropa terus dihantui dengan ancaman islam fundamental dan terorisme. Akses persaingan ketenagakerjaan di negara harus disandingkan dengan masalah pengangguran di ranah domestik. Banyaknya keputusan yang diambil sering mengesampingkan kepentingan nasional, UE dianggap lebih pada posisi yang memberikan solusi untuk menimbulkan masalah yang baru (Proud, 2017, pp. 16-18).

Pengaruh dari hasil sistemik dapat dicontohkan kebijakan luar negeri yang dibuatkan oleh FN melalui Marine Le Pen dengan adanya kampanye Frexit.

Kebijakan tersebut tentu menjadi kebijakan yang mencuri banyak perhatian kalangan akademisi dan media, melihat bahwa Prancis adalah negara yang menginisiasi pembentukan UE dan juga sebagai negara besar yang sangat berpengaruh terhadap UE. FN menjadi partai yang mewakili masyarakat dengan hak-hak populis, artinya disini populisme dapat dipahami adanya antagonistik orang-orang dengan elit politik yang selama ini tidak memihak kepada mereka. Wacana populis yang diimplementasikan program Le Pen diantaranya akan mengembalikan hak suara rakyat umum secara lebih luas, dengan mengadakan hak referendum baik dalam perubahan konstitusi Prancis maupun dalam institusi kelembagaan internasional diantaranya juga referendum terkait keanggotaan UE (Cincu, 2017).

Gambar 3 : Siklus Perilaku Negara Berbasis Norma



Dalam analogi basis norma sesuai dengan gambar diatas, interaksi level unit dan sistemik dapat bersama-sama membentuk siklus pembentukan perilaku negara dalam membentuk kebijakan. Adapun dalam kasus ini, aktor negara diwakili oleh FN (level unit) sebagai partai politik yang berkembang di Prancis. Sedangkan dinamika

perkembangan FN didasari atas norma yang berlaku dari latar belakang FN, serta norma sistemik lembaga struktur UE menambah radikalitas FN dalam menentukan wacana. Identitas politik FN yang akan membentuk (identitas korporasi) wacana domestik, kemudian adanya interaksi hubungan Prancis dengan komunitas internasional (UE) yang membentuk (identitas sosial) di ranah sistemik.

4.3.1 Pengaruh Norma dan Ideologi Front Nasional (FN) sebagai basis identitas dalam membentuk wacana kebijakan

Dalam proses pembentukan identitas sangat berperan besar dalam merepresentasikan kepentingan nasional serta sangat berkaitan erat dengan pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Pentingnya identitas sebagai hasil dari fakta bahwa mereka melakukan dua fungsi penting. Pertama, bagaimana negara memiliki identitas tertentu yang menentukan preferensi terkait mengenai pilihan tindakan dalam berbagai keadaan dan ketika menghadapi keterlibatan aktor yang berbeda. Oleh karenanya identitas negara menciptakan kepentingan dan memprediksi perilaku selanjutnya terhadap negara lain dalam situasi yang terkait dengan sistem internasional. Kedua, menyiratkan bahwa bagaimana suatu negara memandang negara lain sesuai dengan identitas yang di atributkan kepada mereka, sementara itu secara bersamaan negara tersebut membentuk identitasnya sendiri melalui interaksi sosial dan pratiknya.

Dalam analisis level unit yang lebih memfokuskan pada analisis di ranah domestik dengan adanya nilai dan norma sosial di tingkat individu.

Asumsinya bahwa nilai dan norma yang dibangun oleh individu dapat membentuk sebuah identitas dan kepentingan nasional negara. FN yang merupakan partai dengan nilai dan norma diterapkan dalam *collective identity*, yang dibangun bersama dengan gerakan partai sayap kanan menjadi basis dalam pembentukan wacana politik. Sehingga wacana yang dibangun tentu melalui prinsip dasar dari ideologi partai yang telah berkembang. Norma-norma ini akan memberi tahu aktor tentang siapa mereka, apa tujuan mereka, serta peran apa yang akan di mainkan.

Pada pembahasan sebelumnya di BAB II, menjelaskan detail bagaimana FN telah berdiri dan berkembang serta menghadapi pasang surut dalam meraup dukungan suara dari masyarakat Prancis. Latar belakang sejarah FN sebagai partai sayap kanan ekstrem, dengan beberapa aliran gerakan yang menjadi basis norma untuk menciptakan sebuah wacana. Bagaimana identitas politik yang dibangun FN dapat mempengaruhi politik masyarakat Prancis, serta akan mempengaruhi agen yang akan membentuk perilaku agen dalam membentuk kebijakan luar negeri.

Basis identitas dan kepentingan yang telah dibangun oleh agen melalui FN sebagai identitas korporasi, dengan nilai dan norma sosial yang telah berkembang di dalam agen. FN yang telah mempengaruhi politik masyarakat Prancis melalui wacana yang diibangun tentu akan mempengaruhi identitas sosial di ranah sistemik. Adapun bisa juga sebaliknya bahwa interaksi sosial yang telah dibangun oleh Prancis di ranah sistemik bisa menciptakan sebuah

pengaruh tersendiri terhadap perilaku negara dalam menentukan kebijakannya (Nossiter, 2017).

4.3.2 Pengaruh Norma dan Prinsip Lembaga Uni Eropa (UE) dalam membentuk kebijakan wacana FN

Di analogikan dalam kasus ini sesuai pada bab III, bahwa UE sedang mengalami berbagai tantangan yang mengancam stabilitas regional. Fakta gelombang populisme telah menjadi tren dan telah mendapat dukungan suara yang meningkat di beberapa negara Eropa, Populisme telah terbukti mampu merebut kekuasaan di sejumlah besar negara, begitupun dengan Prancis. Bahkan sebagian mereka berasal dari partai sayap kanan jauh yang akan menghadapi serangkaian pemilu. Tentu terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi peningkatan dukungan gerakan tersebut, terkhusus Prancis yang merupakan negara yang cukup berpengaruh selama pendirian UE (Eiermann, 2017).

Norma dan nilai yang diadopsi oleh lembaga Uni Eropa (UE) telah menjadi pertentangan, sejalan dengan dinamika perubahan dunia globalisasi saat ini. Uni Eropa (UE) sebagai identitas politik Eropa menjadi bentuk institusi yang sering disebut sebagai sistem supranasional, sering kali menjadikan negara-negara anggota harus dibatasi dengan aturan dalam struktur tersebut. Walaupun beberapa pilar kebijakan UE masih diberikan pada kedaulatan negara anggota, namun moralitas dari UE sebagai organisasi regional dengan prinsip demokrasi dan liberalisme menjadi suatu pemaksaan

negara untuk menerima aturan yang ada (Grönlund, 2017, p. 27). Sehingga seringkali krisis yang terjadi di Eropa meligitimasi keberadaan institusi tersebut sebagai sebab terjadinya masalah yang ada seperti adanya krisis ekonomi Yunani, krisis imigrasi dan pengungsi, terorisme, pengangguran serta penurunan ekonomi nasional. Arus globalisasi yang tidak terbatas telah membentuk sebuah jarak antara kedaulatan negara dengan lembaga UE. Sehingga tekanan terhadap dampak lembaga tersebut, serta melihat lingkungan yang ada dan ancaman terhadap kebijakan lembaga dapat membuat efek radikalisisasi identitas dari FN (EPC, 2017).

Kekuatan norma dan nilai yang dibangun secara dominan didalam struktur, pada nyatanya bisa mempengaruhi negara untuk mempertimbangan kepentingan nasional mereka. Adapun FN sebagai aktor di dalam unit level dapat mempengaruhi nilai dan norma yang selama ini dipegang oleh negara-negara sebagai komitmen di dalam sistem internasional. Nilai-nilai demokrasi dan liberalisme UE yang selama ini dipegang oleh negara Eropa khususnya Prancis mengalami konflik akibat populisme yang berkembang. Banyaknya ancaman dan konflik akibat globalisasi di Eropa, telah mendorong hak populis berkembang di berbagai negara Eropa. banyaknya isu yang berulang dan tidak terselesaikan dengan baik hanya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik yang selama ini mendominasi di negaranya. Kasus dalam dinamika politik Prancis, dengan tersingkirnya kedua partai mainstream menjadi pukulan berat bagi elit liberal (ISA, 2017).

4.3.3 Wacana politik populisme dalam kebijakan “144 komitmen” Marine Le Pen

Ranah domestic yang dibentuk melalui politik identitas FN melalui latar belakang, sejarah, politik dan sosial yang berkembang dalam masyarakat Prancis. Basis wacana populisme yang dibawakan oleh FN sebagai strategi dalam mewakili kehendak rakyat umum, telah menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan kampanye Marine Le Pen. Kebijakan tersebut digambarkan jelas dalam proposal yang dipublikasi oleh website resmi FN (FN, 2017).

Terdapat 144 program yang diberikan oleh Le Pen dari berbagai sektor baik ekonomi, politik, keamanan, imigrasi dan kebijakan luar negeri. Secara tidak langsung semua kebijakan yang tertera dalam proposal tersebut menghasilkan sebuah kebijakan yang saling berpengaruh baik kebijakan internal maupun eksternal. Misalkan dalam kebijakan ekonomi Le Pen yang menerapkan prioritas nasional, dimana program tersebut tertuju pada perlindungan perekonomian masyarakat Prancis baik dalam para pekerja, perusahaan nasional, produk maupun dalam modal. Hal tersebut tentu telah berpengaruh pada kerjasama Prancis yang selama ini dibangun dalam komunitas Uni Eropa dengan kebijakan ekonomi *The four Freedom* yang membebaskan barang, jasa, modal, dan orang-orang (Laurie Buonanno, 2013, p. 142). Adapun kebijakan lain yang bertolak dengan prinsip UE adalah keinginan untuk keluar dari zona euro, sebagai solusi untuk perbaikan ekonomi melalui pengenalan kembali mata uang nasional (franc), serta zona

bebas Schengen sebagai memperkuat keamanan negara Prancis (Robert Schütze, 2018, p. 861).

Wacana yang dibangun oleh FN setidaknya telah menghasilkan dua bagian, dimana bagian kebijakan domestik dan kebijakan luar negerinya. Kebijakan domestik yang dibuat secara tidak langsung menyentuh aturan yang selama ini berlaku terhadap kerjasama antara Prancis dan lembaga UE. Penerapan prioritas nasional FN, akan mengubah arah politik Prancis yang selama ini kebijakan nasional selaras dengan kebijakan luar negerinya. FN melakukan perubahan secara struktural terhadap kebijakan domestik Prancis, secara radikal FN akan mereformasi segala aturan yang tidak menguntungkan bagi kepentingan nasional (Harris, 2018).

Pertama, Marine Le Pen menetapkan kebijakan untuk mereformasi lembaga UE dengan negosiasi kelonggaran aturan UE terhadap posisi Prancis terutama dalam zona euro, zona Schengen, serta hukum UE. Kedua, jika negosiasi tersebut tidak bisa menghasilkan keputusan yang diinginkan maka Marine Le Pen akan melakukan referendum terhadap keanggotaan Prancis dalam UE. Setidaknya Le Pen menggunakan negosiasi lembaga tersebut untuk meloloskan kebijakan yang dibuat untuk kepentingan nasional Prancis, bahkan jika harus mengubah konstitusi nasional secara keseluruhan untuk dapat melaksanakan program. Sehingga kebijakan Marine Le Pen memberikan pilihan antara mengubah nilai-nilai lembaga UE atau keluar dari keanggotaan (l'Ifri, 2017).

Fakta wacana yang telah dibangun melalui proposal 144 komitmen Marine Le Pen, telah mendapat dukungan yang sangat signifikan. Berjalannya kepemimpinan yang telah dibangun sejak 2011 silam, hingga mendapat suara terbanyak dalam hasil pemilihan Presiden 2017 yang meraup jumlah suara berkali-kali lipat dari suara yang pernah didapat oleh Jean Marie Le Pen. Selama 6 tahun silam, partai ini terus meningkatkan suara elektoralnya, membuat keuntungan dalam setiap pemilihan lokal, Eropa dan regional. Bahkan fakta hasil tersebut juga menjadikan FN bukan hanya partai atau gerakan protes pemerintah, tetapi sebagai oposisi utama yang akan mewakili masyarakat Prancis. Pada kenyataan bahwa norma dan nilai yang dipegang oleh FN yang selama ini bertentangan dengan prinsip UE, telah mendapat perhatian dan dukungan lebih dari masyarakat Prancis. Sehingga keberhasilan wacana yang telah dibangun FN, menjadi fakta bahwa FN berhasil mempengaruhi (konstruksi) politik masyarakat Prancis yang skeptis terhadap partai politik arus utama yang pro dengan UE (Chrisafis, 2017).

Table 7 : Poin Kebijakan Domestic dan Kebijakan Luar Negeri FN

Kebijakan Domestik	Kebijakan luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Kembalikan mata uang nasional Franc • Proteksi ekonomi • French First • melindungi perbatasan Perancis (keluar dari Schengen & memperketat akses imigrasi) • pemotongan imigrasi 10.000 pertahun 	<ul style="list-style-type: none"> • negosiasi lembaga UE (zone euro dan zona Schengen) • Referendum keanggotan UE • Keluar dari Nato • Intensitas kerjasama dengan Russia • Memperbesar anggaran pertahanan • Stop imigrasi

Table 8 : Kebijakan Marine Le Pen yang bertolak belakang dengan prinsip UE

Proposal Le Pen VS Prinsip UE	
<ul style="list-style-type: none"> • Reindustrialisasi Prancis • Kedaulatan moneter, menolak perjanjian perdagangan bebas • Menolak impor dan produk asing yg tdk sesuai prosedur • Investasi asing (jika sesuai dengan kepentingan nasional) • Estabilitas pertahanan, menambah anggaran pertahanan • Keluar dari Nato • Mengurangi imigrasi legal menjadi 10.000 per tahun • keluar dari zona schengen 	<p>Tiga pilar kerjasama UE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunitas Eropa (EC) • CFSP • Peradilan dan masalah dalam negeri (JHA)